

PKS Walk Out, DPR RI Resmi Sahkan Perppu Cipta Kerja



Realitarakyat.com – Paripurna DPR RI kali ini penuh dengan dinamika, sebelum diketok palu oleh ketua DPR RI Puan Maharani Fraksi PKS menyatakan walk out dari ruang rapat.

Namun hal itu tidak mempengaruhi persidangan DPR tetap meresmikan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) jadi Undang-undang (UU) pada rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 pada Selasa (21/3/2023).

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” ujar Ketua DPR Puan Maharani diikuti persetujuan anggota parlemen dan ketukan palu.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR M. Nurdin sebelumnya bersama pemerintah melakukan beberapa kali rapat untuk membahas materi Perppu Cipta Kerja.

Dalam berbagai rapat itu, klaimnya, mereka selalu mengedepankan musyawarah.

Meskipun begitu, lanjutnya, tetap ada dua fraksi yang menolak Perppu Cipta Kerja untuk jadi UU. Baleg sendiri tetap menyetujui Perppu Cipta Kerja untuk disahkan jadi UU di rapat paripurna DPR

“Sesuai mekanisme pengambilan keputusan, sebagai yang diatur dalam ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” jelas Nurdin pada kesempatan yang sama.

Diberitakan sebelumnya, Baleg DPR menyetujui Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dibawa ke pembahasan tingkat dua untuk disahkan menjadi UU.

“Kami bertanya, apakah hasil pembahasan terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dapat disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua?” tanya Nurdin yang diikuti persetujuan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Sedangkan di mini fraksi Baleg sendiri, Nurdin menjelaskan dari sembilan fraksi, ada tujuh yang setuju Perppu Cipta Kerja disahkan jadi UU. Sedangkan ada dua yang menolak.

Tujuh fraksi itu yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi yang tak setuju yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sementara itu, DPD juga menyatakan menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja jadi UU.(ilm)